



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SUB UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDHY SRIYATNO
2. Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3. NHK : 467221

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.420.000.000**

1. Tanah Seluas 2520 m2 di KARANGANYAR, WARISAN Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 2148 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 1900 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 300 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
6. Tanah Seluas 300 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 700 m2/200 m2 di KARANGANYAR, WARISAN Rp. 510.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 253.000.000**

1. MOBIL, HONDA BRIO DD1` Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA XIB02R07L0 AT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA Tahun 2014, HASIL SENDIRI



	Rp. 140.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA		Rp.	31.000.000
D. SURAT BERHARGA		Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS		Rp.	218.957.129
F. HARTA LAINNYA		Rp.	----
Sub Total		Rp.	2.922.957.129
III. HUTANG		Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp.	2.922.957.129

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **28 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.